

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai tujuan pokok menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pada negara tersebut.

Hal tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank, sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memperoleh keuntungan terbesar melalui penyaluran kredit secara optimal kepada masyarakat. Bank akan menerima dana dari masyarakat atau biasa disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan bagi bank sendiri kegiatan penyaluran kredit ini memberikan keuntungan berupa bunga yang diperoleh sebagai imbalan atas dana yang telah dipinjamkan kepada masyarakat (Yunnyarti 2022).

Penyaluran kredit merupakan fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Gayo et al., 2022). Dalam hal ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memfokuskan penyaluran kredit pada segmen korporasi, yaitu pembiayaan kepada

perusahaan besar baik swasta maupun BUMN, yang menjadi porsi terbesar dalam portofolio kredit karena nilainya tinggi dan kontribusinya signifikan terhadap perekonomian. Selain itu, BNI juga menyalurkan kredit pada segmen konsumen dan UMKM, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil.

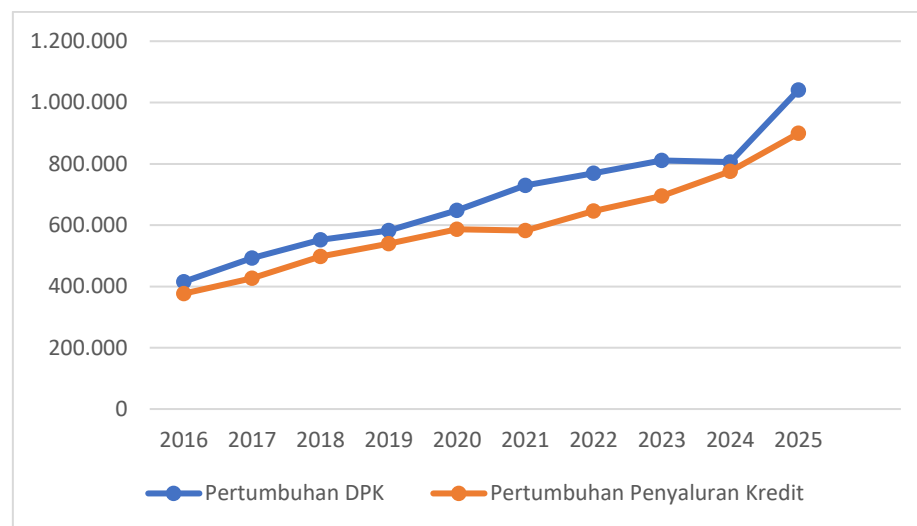
Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan. DPK memiliki peran penting sebagai sumber utama pendanaan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula potensi bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Namun dalam praktiknya, hubungan antara DPK dan penyaluran kredit tidak selalu berjalan searah. Penyaluran kredit juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat suku bunga, kredit bermasalah, rasio kecukupan modal, likuiditas, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, meskipun DPK menjadi faktor utama, penyaluran kredit tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang turut menentukan efektivitasnya.

Pada periode 2019–2023, sektor perbankan menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit. Pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengubah perilaku dalam menabung dan mengajukan kredit. Selain itu, pasca pandemi, pemerintah melakukan intervensi dengan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun pada bank Himbara sejak 12 September 2025 untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit tidak hanya dipengaruhi oleh DPK, tetapi juga oleh sumber dana lain dari pemerintah. Oleh karena itu, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit, khususnya pada Bank Negara Indonesia (BNI), di tengah adanya intervensi pemerintah.

Berikut data pertumbuhan DPK dan penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia Tahun 2016-2025, sebagai berikut:



Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan DPK dan penyaluran kredit 2016-2025

Sumber: Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016-2025 (data diolah penulis, 2026)

Berdasarkan data, Dana Pihak Ketiga (DPK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2016–2025 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2016 sebesar Rp415.453 miliar meningkat signifikan pada tahun 2017 menjadi Rp492.748 miliar (naik Rp77.295 miliar), didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5% serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan BNI yang

menunjukkan pertumbuhan dana murah. Hingga pada tahun 2019, DPK terus meningkat menjadi Rp582.541 miliar seiring ekspansi bisnis dan stabilitas makroekonomi. Saat pandemi COVID-19, DPK pada tahun 2019 justru meningkat dari Rp582.541 miliar menjadi Rp647.572 miliar pada tahun 2020 (naik Rp65.031 miliar) dan 729.169 miliar rupiah pada tahun 2021 (naik Rp81.597 miliar).

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) seperti penurunan suku bunga, stimulus fiskal, serta program restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan yang meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong masyarakat menyimpan dana. Pada periode pemulihan 2022–2023, DPK tetap meningkat menjadi Rp769.269 miliar dan Rp810.730 miliar, didukung oleh pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan aktivitas bisnis. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi Rp805.511 miliar (turun Rp5.219 miliar), dikarenakan meningkatnya konsumsi, serta pergeseran dana ke instrumen investasi seperti pasar modal. Pada tahun 2025, DPK melonjak signifikan menjadi Rp1.040.834 miliar (naik Rp235.323 miliar), yang tidak terlepas dari meningkatnya likuiditas sistem perbankan serta dukungan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, penyaluran kredit juga menunjukkan tren meningkat namun lebih fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar Rp376.595 miliar meningkat signifikan pada tahun 2017 menjadi Rp426.790 miliar (naik Rp50.195 miliar), sejalan dengan meningkatnya permintaan pembiayaan di sektor riil. Hingga tahun 2019 kredit mencapai Rp539.862 miliar, didukung oleh ekspansi usaha dan stabilitas ekonomi. Pada masa pandemi, kredit masih tumbuh pada tahun 2020 menjadi Rp586.207 miliar (naik Rp46.345 miliar), namun pada tahun 2021 mengalami penurunan

menjadi Rp582.436 miliar (turun Rp3.771 miliar). Hal ini sesuai dengan laporan BNI yang menunjukkan perlambatan kredit akibat rendahnya permintaan dari dunia usaha serta kebijakan kehati-hatian bank di tengah risiko kredit.

Memasuki periode pemulihan, kredit kembali meningkat dari Rp646.188 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp695.085 miliar pada tahun 2023, didorong oleh pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan investasi. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp775.872 miliar (naik Rp80.787 miliar) dan pada tahun 2025 sebesar Rp899.531 miliar (naik Rp123.659 miliar). Kenaikan tajam pada tahun 2025 tidak hanya dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga oleh intervensi pemerintah melalui penempatan dana Rp200 triliun pada bank Himbara, yang meningkatkan likuiditas perbankan sehingga memperkuat kapasitas penyaluran kredit ke sektor riil.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki peran penting dalam mendukung penyaluran kredit oleh perbankan. Meskipun terjadi fluktuasi pada masa pandemi COVID-19, secara umum peningkatan DPK memberikan dukungan likuiditas yang kuat bagi bank untuk menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada masa pemulihan ekonomi, penyaluran kredit kembali meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi dan didukung oleh pertumbuhan DPK serta intervensi pemerintah melalui peningkatan likuiditas perbankan.

Penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyalura Kredit menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan penelitian (Amelia et al., n.d.) menunjukkan hasil bahwa DPK tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap penyaluran kredit perbankan. Sebaliknya, pada penelitian (N.P.S.L. Putri & G.P.A.J. Susila, 2025) menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu belum banyak penelitian yang secara khusus meneliti hubungan antara DPK dan penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagian besar penelitian terdahulu meneliti hubungan tersebut pada bank-bank umum, bank swasta nasional, maupun bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Fenomena ini penting untuk diteliti karena terdapat perbedaan antara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Meskipun DPK mengalami peningkatan, terutama pada masa pandemi dan tahun 2025, penyaluran kredit tidak selalu meningkat dan bahkan sempat menurun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK tidak selalu diikuti oleh peningkatan kredit. Selain itu, pada periode pasca pandemi, pertumbuhan kredit juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah yang meningkatkan likuiditas perbankan. Dengan demikian, penyaluran kredit tidak hanya dipengaruhi oleh DPK, tetapi juga oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan risiko kredit. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit pada BNI.

Berdasarkan fenomena dan gap researcher pada penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga**

(DPK) Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2016-2025”, sehingga dapat diketahui sejauh mana peran DPK dalam mendukung efektifitas kinerja intermediasi bank tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perkembangan DPK pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2016-2025.
2. Bagaimana perkembangan penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2016-2025.
3. Bagaimana pengaruh pada DPK terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2016-2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Perkembangan DPK pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selama periode 2016-2025.
2. Perkembangan penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selama periode 2016-2025.
3. Pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selama periode 2016-2025.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu serta pemahaman terkait Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Tugas Akhir Jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi. Penelitian ini memberikan pengalaman, pengetahuan, serta wawasan mengenai dunia kerja, khususnya di sektor lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk menerapkan secara langsung teori dan praktik yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, sehingga dapat memperkuat pemahaman dalam bidang perbankan dan keuangan.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi yang relevan dengan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai informasi yang akurat, relevan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait perekonomian khususnya tentang perbankan.

No	Keterangan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul dan Acc Judul																
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan.																
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																
4	Seminar proposal tugas akhir																
5	Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi																
6	Pengumpulan dan pengelolaan data																
7	Proses bimbingan untuk																

No	Keterangan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	menyelesaikan Tugas Akhir																
8	Ujian Tugas Akhir, revisi Tugas Akhir, dan pengesahan Tugas Akhir																

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026